LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR WELERI MAKMUR
TAHUN 2020

BPR WM

Senantiasa Tepercaya Melayani Anda

JL. MAJAPAHIT, RUKO GAYAMSARI NO. 17-20 SEMARANG

TELP. 024 6733325, FAX. 024 6723588

www.bprwm.co.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
Tujuan Penerapan Tata Kelola 1
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 7
B. Kepemilikan Saham Direksi 9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR WM 9
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 9
C. Hubungan Antar Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham 9
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi 9
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi 9
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 10
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM 10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 10
E. Hubungan Antar Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham 10
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris 10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris 10
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris 10
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS 10
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS 11
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 11
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 11
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 11
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 11
I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 12
J. Permsalahan Hukum yang Dihadapi 12
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 13
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 13
BAB III HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA 14
A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola 14
B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola 17

KATA PENGANTAR

PT BPR Weleri Makmur, selanjutnya cukup disebut BPR WM selalu berupaya menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi. Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

BPR WM telah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency)* dan kewajaran *(fairness)*.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aktivitas operasional akan semakin meneguhkan komitmen untuk mewujudkan BPR WM menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah, dengan senantiasa:

1. Memahami berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat;
2. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi;
3. Menumbuhkembangkan dan menjaga kepercayaan semua *stakeholders* melalui kebijakan yang *prudent*, transparan dan komunikasi yang terbuka; dan
4. Mengembangkan, menyempurnakan, dan mensinergikan segala bidang terkait untuk mencapai nilai tambah yang optimal dan hasil yang terbaik.

Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, BPR WM selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, yaitu: Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus BPR WM dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB I

PENDAHULUAN

BPR WM memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menerapkan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar BPR WM dapat terus tumbuh berkelanjutan secara wajar untuk menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BPR WM senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank *(prudential banking principle)*. Hal ini sudah menjadi kebutuhan BPR WM untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR WM senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola, meliputi:

a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat;
d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola pada BPR WM bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja. Penerapan Tata Kelola dalam segala aktivitas sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi bisnis yang telah ditetapkan.
2. Menjaga kegiatan operasional agar selalu patuh pada setiap ketentuan intern maupun ekstern serta ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders)*.
4. Memperkuat budaya organisasi.
5. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola yang dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Kerry Thamrim
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM; 2. Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Merealisasikan pencapaian semua target-target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 5. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha; 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; 7. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan; 8. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan; 10. Mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 12. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi;		

13. Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat;
14. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi;
15. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;
16. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS;
17. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

2.

Nama	:	Hendrardi
Jabatan	:	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manjemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. Memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain;
5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatiihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
6. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai;
7. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi;
8. Mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;

	9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
Triwulan I 2020 Berdasarkan pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2020, Dewan Komisaris merekomendasikan: 1. Memaksimalkan pemasaran Tabungan X Pander. 2. Agar lebih berhati-hati dalam aktivitas penyaluran kredit khususnya saat melakukan analisis debitur terdampak pandemi Covid-19. 3. Lebih selektif dalam melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Pandemi Covid-19.	1. Pemasaran Tabungan Tamasha Xpander telah mencapai target, jumlah rekening 1.499. 2. Antisipasi penurunan tabungan karena pencalran Tamasha 200 dan Link pada Mei 2020, total Rp6,2 miliar, dengan memasarkan Tabungan Smart, Smart Pro dan Tabungan Rencana. 3. Kebijakan perkreditan pada masa Pandemi Covid-19 lebih selektif, antara lain; a. Tidak menyalurkan kredit bagi *New* CIF (hanya melayani penyaluran kredit debitur existing dan/atau yang telah lunas) ; dan b. melakukan analisis restrukturisasi kredit berdasarkan kebutuhan debitur sehingga diharapkan tidak timbul moral hazard.
Triwulan II 2020 1. Agar dilakukan *maintenance* Tabungan Tamasha khususnya Tamasha Xpander yang menjadl penopang utama pada pos tabungan. 2. Tingginya tingkat NPL bruto yang pada akhir bulan Juni 2020, yaitu berada pada posisi 8.04%, Maka harus lebih intensif melakukan penagihan rutin . Setiap kantor Cabang agar memiliki action plan perbaikan NPL khususnya Kantor Cabang Weleri dan Sragen.	1. *Maintenance* nasabah Tamasha Xpander dengan cara mengirim SMS notifikasi dan dukungan Development Program yang dikembangkan oleh Tim TSI BPR WM untuk memantau setoran dan tunggakan . 2. Melakukan upaya pengendalian NPL di saat pandemi Covid-19 secara maksimal dengan melakukan koordinasi melalui meeting bulanan dan penyusunan *action plan* masing-masing Kantor Cabang.

Triwulan III 2020 1. Dalam proses Pemberian kredit: a. Meningkatkan pemasaran kredit khususnya pada sektor ekonomi yang dikuasai oleh bank dan melakukan branding yang optimal; b. Meyakini tujuan penggunaan kredit dan kemampuan debitur; dan c. Meningkatkan kemampuan Analis kredit dan melakukan monitoring kredit rutin sedikitnya dalam 6 (enam) bulan setelah realisasi. 2. Dalam proses penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah: a. Melakukan Identifikasi kredit bermasalah. b. Menyelesaikan NPL, PH dan AYDA; dan c. Peningkatan kualitas SDM perkreditan; 3. Penerapan Sistem Teknologi Informasi: a. Penyempurnaan dan otomatisasi pada program bantu; dan b. Melakukan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO hingga 60%.	1. Upaya perbaikan NPL yang cukup tinggi akan lebih mendalami tujuan penggunaan dana, sumber pengembalian, dan peningkatan kompetensi komite kredit terhadap sektor ekonomi yang dibiayai; 2. Menambahkan rincian tujuan penggunaan dana pada Memorandum Online sehingga dapat diverifikasi antara jumlah dana yang dibutuhkan dan dengan total plafon; 3. Meningkatkan pemahaman sebab-sebab kredit bermasalah dan melakukan tindakan yang diperlukan; 4. Menyesuaian jenis kredit yang diberikan dengan sumber pengembalian dari debitur; 5. Memprioritaskan penyelesaian kredit NPL sebelum akhir tahun 2020 melalui program pemberian diskon denda dan sebagian bunga.
Triwulan IV 2020 1. Memberikan perhatian lebih pada penyelesaian kredit hapus buku dan agunan yang diambil alih (AYDA) serta tetap menyalurkan kredit dengan penuh kehati-hatian. 2. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis, diantaranya: a. Perkembangan aset Triwulan IV telah mencapai target yang dianggarkan; b. Perkembangan laba usaha menurun secara YoY sebesar Rp4.888.458 ribu atau (21,70%), hal tersebut disebabkan pendapatan bunga kredit, dan biaya PPAP; c. Pecapaian dana telah melebihi target sebesar 101.24% atau Rp423.182.654 ribu; dan d. Realisasi penyaluran kredit hanya mencapai 87.20% (tidak mencapai anggaran).	1. Progres penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA terus dimonitoring secara intensif melalui meeting penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan setiap bulan. Program penghapusan denda dan pengurangan bunga juga masih dilakukan secara *customized* melihat kondisi debitur, sumber pelunasan dan kondisi agunan. Khusus untuk kredit hapus buku, Kadep Monitoring juga menampaikan action plan dua kali setiap bulannya. 2. Peningkatan PYD yang sehat diupayakan dengan menggelar Promo Extra Kredit69 mulai 18 Februari - 7 Mei 2021. Promo ini menerapkan suku bunga kredit 0,69% pm flat sampai dengan jangka waktu 3 tahun dan plafon maksimal Rp2 miliar per debitur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Djoko Sumarno
	Jabatan	:	Komisaris Utama
2.	Nama	:	Yenny Basuki
	Jabatan	:	Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM;
5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR WM, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;
7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai:
   a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
   b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal;
10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.

Rekomendasi kepada Direksi:

Triwulan I 2020

Berdasarkan pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2020, Dewan Komisaris merekomendasikan:

1. Memaksimalkan pemasaran Tabungan X Pander.
2. Agar lebih berhati-hati dalam aktivitas penyaluran kredit khususnya saat melakukan analisis debitur terdampak pandemi Covid-19.
3. Lebih selektif dalam restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Pandemi Covid-19.

Triwulan II 2020

1. Agar dilakukan *maintenance* Tabungan Tamasha khususnya Tamasha Xpander yang menjadi penopang utama pada pos tabungan.
2. Tingginya tingkat NPL bruto yang pada akhir bulan Juni 2020, yaitu berada pada posisi 8.04%, Maka harus lebih intensif melakukan penagihan rutin. Setiap kantor Cabang agar memiliki action plan perbaikan NPL khususnya Kantor Cabang Weleri dan Sragen.

Triwulan III 2020

1. Dalam proses Pemberian kredit:
   a. Meningkatkan pemasaran kredit khususnya pada sektor ekonomi yang dikuasai oleh bank dan melakukan branding yang optimal;
   b. Meyakini tujuan penggunaan kredit dan kemampuan debitur; dan
   c. Meningkatkan kemampuan Analis kredit dan melakukan monitoring kredit rutin sedikitnya dalam 6 (enam) bulan setelah realisasi.
2. Dalam proses penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah:
   a. Melakukan Identifikasi kredit bermasalah.
   b. Menyelesaikan NPL, PH dan AYDA; dan
   c. Peningkatan kualitas SDM perkreditan.
3. Penerapan Sistem Teknologi Informasi:
   a. Penyempurnaan dan otomatisasi pada program bantu; dan
   b. Melakukan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO hingga 60%.

Triwulan IV 2020

1. Memberikan perhatian lebih pada penyelesaian kredit hapus buku dan agunan yang diambil alih (AYDA) serta tetap menyalurkan kredit dengan penuh kehati-hatian.
2. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis, diantaranya:
   a. Perkembangan aset Triwulan IV telah mencapai target yang dianggarkan;
   b. Perkembangan laba usaha menurun secara YoY sebesar Rp4.888.458 ribu atau (21,70%), hal tersebut disebabkan pendapatan bunga kredit, dan biaya PPAP;
   c. Pecapaian dana telah melebihi target sebesar 101.24% atau Rp423.182.654 ribu; dan
   d. Realisasi penyaluran kredit hanya mencapai 87.20% (tidak mencapai anggaran).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diantaranya mengatur bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mengingat modal inti BPR WM belum mencapai Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) maka sesuai POJK Tata Kelola, belum diwajibkan membentuk Komite-Komite sebagaimana tersebut di atas.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	881.000.000	5.04%
2	Hendrardi	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	600787 - -	1. PT BPR Mandiri Artha Abadi 2. PT Multi Karya Mitra Sentosa 3. CV Mitra Karya Abadi	10% 10% 12,5%
2	Hendrardi	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hendrardi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tanudjan Sugiarto - mertua, Hengky Tanto Sugiarto – saudara kandung dari istri.
2	Hendrardi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-
2	Yenny Basuki	1.873.000.000	10.70%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-	-
2	Yenny Basuki	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1.468.000.000	2	507.000.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total		[redacted]	1.468.000.000	[redacted]	507.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis fasilitas lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil dinas, 1 (satu) unit setiap orang	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi kesehatan dan BPJS	Asuransi kesehatan dan BPJS
4	Fasilitas Lainnya a. Komunikasi b. Natura	Kuota pulsa dan data telekomunikasi Pakaian seragam dinas	Tidak Ada Pakaian seragam dinas

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris terendah (b)	1,5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20 April 2020	2 (dua) orang	Evaluasi kinerja triwulan I: perkembangan aset, laba usaha, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kualitas kredit.
2	10 Agustus 2020	2 (dua) orang	a. Evaluasi kinerja triwulan II: perkembangan aset, laba usaha, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kualitas kredit. b. Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Semester I 2020.
3	19 Oktober 2020	2 (dua) orang	Evaluasi kinerja triwulan III: perkembangan aset, laba usaha, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kualitas kredit.
4	16 Desember 2020	4 (empat) orang	Rapat Bersama Direksi membahas Rencana Bisnis BPR WM Tahun 2021.
5	8 Februari 2021	2 (dua) orang	a. Evaluasi kinerja triwulan IV: perkembangan aset, laba usaha, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kualitas kredit. b. Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Semester II 2020.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingakat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Djoko Sumarno	5	0	100%
2	Yenny Basuki	5	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal *(Internal Fraud)*

Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total *Fraud*	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0

Jumlah penyimpangan internal pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 0 (nol) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan cukup tinggi dan integritas masing-masing pengurus maupun pegawai semakin dapat diandalkan.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	14	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	-
Total	18	-

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR WM selama tahun 2020 sejumlah 18 (delapan belas) perkara yang semuanya merupakan perkara perdata yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) sebanyak 14 (empat belas) perkara dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 4 (empat) perkara.

Klasifikasi permasalahan hukum perdata berdasarkan pokok perkara:

a. Perkara Wanprestasi sebanyak 15 (lima belas) perkara; dan
b. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 3 (tiga) perkara.

Dari jumlah permasalahan hukum tersebut poisisi BPR WM sebagai:

a. Pihak penggugat sebanyak 12 (dua belas) perkara; dan
b. Pihak tergugat sebanyak 6 (enam) perkara.

Posisi BPR WM sebagai penggugat dalam Gugatan Sederhana untuk perkara-perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	7 Jan 20	Sosial	Turnamen Nasional Bumerang Indonesia ke 10	Tunas Bumi X	5.000.000
2	13 Jan 20	Sosial	Perayaan Imlek	Paroki St. Maria Semarang	1.750.000
3	31 Jan 20	Sosial	Pengadaan mobil ambulan	LAZISNU Kendal	70.000.000
4	20 Feb 20	Sosial	Kegiatan Lingkungan Paskah	Gereja Santo Ignatius Krapyak	2.000.000
5	30 Jul 20	Sosial	Pemberian hewan Qurban	Masjid: 1. Baitul Muttaqin Semarang 2. Al Hidayah Kendal 3. Al Urwatil Wusto Kudus 4. Al Ma'sum Surakarta 5. Sidowayah Klaten 6. Sholihin Sragen 7. At Thoharoh Tegal	 3.500.000 3.500.000 3.200.000 3.100.000 2.800.000 2.500.000 3.300.000
2	6 Des 20	Sosial	Bakti sosial HUT BPR WM ke-31	Darul Qur'an Semarang	3.500.000

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri atas: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite, 4. Penanganan Benturan Kepentingan, 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, 6. Penerapan Fungsi Audit Intern, 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern, 8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern, 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit, 10. Rencana Bisnis, dan 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas 11 (sebelas) faktor sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Berikut merupakan ringkasan kertas kerja penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Tahun 2020:

No.	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
1	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	6	50%	0,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	11	8	40%	0,65
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	9	5	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,35
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,27
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	10	9	50%	0,61
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	14	8	40%	0,75
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,3
	Penjumlahan S + P + H				1,66
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,25
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	0	1	50%	0
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	0	3	40%	0
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	0	1	10%	0
	Penjumlahan S + P + H				0

	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0
4	Penanganan Benturan Kepentingan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	2	1	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				2,5
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	5	50%	0,8
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	10	5	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	7	3	10%	0,23
	Penjumlahan S + P + H				1,83
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,18
6	Penerapan Fungsi Audit Intern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	5	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	9	4	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	8	4	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				2
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	1	1	50%	0,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,5
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,04
8	Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	3	50%	1,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	21	7	40%	1,2
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	5	2	10%	0
	Penjumlahan S + P + H				2,7
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	5	2	40%	1
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,15
	Penjumlahan S + P + H				2,65
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,2
10	Rencana Bisnis				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	3	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	1	1	10%	0,1
	Penjumlahan S + P + H				1,9
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,14
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	3	1	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	9	4	40%	0,7
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,9
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,14

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Nilai Faktor	0.27	0.25	-	0.25	0.18	0.20	0.04	0.27	0.20	0.14	0.14	**1.94**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan
Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kelemahan: Penambahan jumlah Direksi menjadi 3 (tiga) orang telah diputuskan pada RUPS Januari 2020. Namun, teknis pemenuhan anggota Direksi masih berproses hingga akhir 2020. Kekuatan: Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. **Faktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Kelemahan: Penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang telah diputuskan pada RUPS Januari 2020. Namun, teknis pemenuhannya masih berproses hingga akhir 2020. Kekuatan: Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum. **Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite** BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 80 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. **Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan** Kelemahan: Transaksi yang berpotensi terdapat benturan kepentingan belum secara tertib dilengkapi dengan dokumen pendukung pengungkapan atas benturan kepentingan tersebut. Kekuatan: BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan. **Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan** Kelemahan: Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara tertib dan berkala. Kekuatan: Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **Faktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern** Kelemahan: Belum memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM khususnya terkait dengan audit intern. Kekuatan: Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern** Kelemahan: Auditor Ekstern masih kurang dalam memberi informasi mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya kepada Manajemen. Kekuatan: Penugasan audit kepada Auditor Ekstern (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK. **Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern** Kelemahan: Implementasi manajemen risiko dalam berbagai aktivitas unit kerja masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Kekuatan: Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit** Kelemahan: Menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK. Kekuatan: Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK. **Faktor 10 Rencana Bisnis BPR** Kelemahan: Belum ada rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan. Kekuatan: Rencana Bisnis 2021 telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK. **Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan** Kelemahan: Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* sehingga masih perlu pengolahan data. Kekuatan: Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, kini dan utuh.

B. **Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola**

Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR WM sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
1.94	**Baik**

Analisis

Secara umum kami simpulkan bahwa penerapan Tata Kelola pada PT BPR Weleri Makmur cukup memadai dengan nilai komposit **1,94** peringkat komposit: **Baik**. Namun demikian masih terdapat kelemahan pada beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kelemahan	: Penambahan jumlah Direksi menjadi 3 (tiga) orang telah diputuskan pada RUPS Januari 2020. Namun, teknis pemenuhan anggota Direksi masih berproses hingga akhir 2020.
Penyebab	: Adanya pandemi Covid-19 sehingga ujian sertifikasi Direksi BPR ditunda, hal ini juga berpengaruh terhadap Uji Kelayakan dan Kepatutan.
Rencana Tindak	: Menetapkan susunan pengurus pada RUPS 2021 setelah semua syarat-syarat administratif telah terpenuhi.
Target Waktu	: Februari 2021
Kekuatan	:Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kelemahan	: Penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang telah diputuskan pada RUPS Januari 2020. Namun, teknis pemenuhannya masih berproses hingga akhir 2020.
Penyebab	: Adanya pandemi Covid-19 sehingga ujian sertifikasi Komisaris BPR ditunda, hal ini juga berpengaruh terhadap Uji Kelayakan dan Kepatutan.
Rencana Tindak	: Menetapkan susunan pengurus pada RUPS 2021 setelah semua syarat-syarat administratif telah terpenuhi.
Target Waktu	: Februari 2021
Kekuatan	:Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 80 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Kelemahan	:Transaksi yang berpotensi terdapat benturan kepentingan belum secara tertib dilengkapi dengan dokumen pendukung pengungkapan atas benturan kepentingan tersebut.
Penyebab	: Berupaya menghindari setiap transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.
Rencana Tindak	:Menerapkan kebijakan mengenai benturan kepentingan.
Target Waktu	:- (sudah dilaksanakan)
Kekuatan	:BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kelemahan	:Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara tertib dan berkala.
Penyebab	: Fokus pada pembahasan masalah-masalah aktual ditinjau dari sistem pengendalian intern.
Rencana Tindak	:Pemantauan berkala setahun dua kali
Target Waktu	:Mei dan November
Kekuatan	:Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan	:Belum memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM khususnya terkait dengan audit intern.
Penyebab	:Masih fokus pada pemeriksaan (audit) seluruh kantor dan memperkuat sistem pengendalian

	intern.
Rencana Tindak	:Menyusun program rekruitmen dan pengembangan SDM internal auditor
Target Waktu	: Juni 2021
Kekuatan	:Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kelemahan	:Auditor Ekstern masih kurang dalam memberi informasi mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya kepada Manajemen.
Penyebab	:Waktu interaksi dengan auditor ekstern yang sangat terbatas.
Kekuatan	:Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan	: Implementasi manajemen risiko dalam berbagai aktivitas unit kerja masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
Penyebab	: Masih perlu sosialisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko dalam setiap aktivitas masing-masing unit kerja.
Target Waktu	: September 2021
Kekuatan	: Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kelemahan	:Menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.
Penyebab	:Selalu menekankan perntingnya kepatuhan terhadap peraturan.
Kekuatan	:BPR WM tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Kelemahan	:Belum ada rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.
Penyebab	:Setiap tahun laba usaha tidak semuanya dibagi menjadi deviden, sehingga menjadi komponen penambah modal inti.
Kekuatan	:Rencana Bisnis 2021 telah dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kelemahan	:Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* (CBS) sehingga masih perlu pengolahan data.
Penyebab	:masih dalam proses penyempurnaan fitur-fitur CBS untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Rencana Tindak	:Mengupayakan penyempurnaan CBS dan mengembangkan program bantu untuk mendukung sistem pelaporan.
Target Waktu	:Desember 2021
Kekuatan	:Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, kini dan utuh.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2020 ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Laporan Penerapan Tata Kelola ini dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Semarang, 27 April 2021
BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR SEMARANG

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama

Lampiran I

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

1. Kantor Akuntan Publik "HELANTONO dan Rekan" Cabang Semarang, alamat Jalan Tegalsari Barat V No.24 Semarang, sebagai pemeriksa terhadap laporan keuangan PT BPR Weleri Makmur tahun 2020.
2. Kantor Akuntan Publik "INDARTO WALUYO, Ak, M.Acc., CPA", alamat jalan Tegalsari Raya No.14, Jomblangan, Banguntaman, Bantul, Yogyakarta. Untuk melakukan pemeriksaan Kaji Ulang terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SKAI) PT BPR Weleri Makmur sejak tahun 2019.